



# BUPATI MERANGIN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf l juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :

- a. Pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; dan
- b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi ataupunjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KEBERATAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan ...

## BAB XIII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Retribusi...

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.

#### Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN,

ttd

**N A L I M**

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 15 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

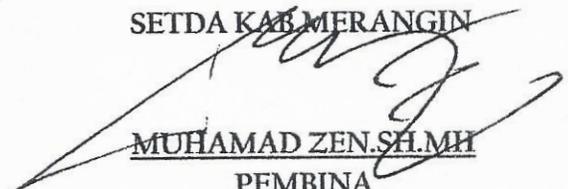
**SUHAIBI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai aslinya

KABAG HUKUM

SETDA KAB MERANGIN

  
**MUHAMAD ZEN.SH.MH**

PEMBINA

NIP. 196705051991031002

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 Mei 2013

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI TERA ALAT-ALAT UTTP  
 PADA BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN  
 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO (1)	JENIS ALAT-ALAT UTTP (2)	TERA (3)	TERA ULANG (4)	KALIBRASI (5)	JUSTIR (6)
1.	UKURAN PANJANG				
	a. sampai dengan 2 meter	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 3,000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
2.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				
	a. sampai dengan 2 liter	Rp. 1,500	Rp. 500	Rp. 2,000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 1,500	Rp. 750	Rp. 3,000	
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
3.	BEJANA UKUR				
	a. sampai dengan 20 liter	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 5,000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 30,500	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 10,000
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 40,000	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 12,500
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1,000 liter	Rp. 40,000	Rp. 20,000	Rp. 40,000	Rp. 10,000
	e. Lebih dari 1,000 liter tarif 1,000 liter ditambah untuk setiap 1,000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 15,000
4.	ANAK TIMBANGAN				
1.	ANAK TIMBANGAN BIASA				
	a. sampai dengan 1 kilogram	Rp. 600	Rp. 300	Rp. 1,500	Rp. 200
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 2,000	Rp. 300
	c. Lebih dari 5 kilogram, sampai dengan 50 kilogram	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 3,000	Rp. 500
2.	ANAK TIMBANGAN HALUS				
	a. sampai dengan 1 kilogram	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 2,000	Rp. 300

5.	TIMBANGAN MEKANIK						
1.	DACIN LOGAM						
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000	
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 4,000	Rp. 3,000	Rp. 5,000	Rp. 1,500	
	c.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 2,000	
2.	TIMBANGAN MEJA						
	a.	sampai dengan 10 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000	
	b.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 4,000	Rp. 3,000	Rp. 5,000	Rp. 1,500	
3.	TIMBANGAN PEGAS						
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 4,000	Rp. 1,500	
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 2,000	
	c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 7,000	Rp. 6,000	Rp. 8,000	Rp. 3,000	
4.	TIMBANGAN KUADRAN/ SURAT					Rp. 3,000	Rp. 2,000
					Rp. 4,000	Rp. 1,000	
5.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT						
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 3,000	Rp. 6,000	Rp. 1,500	
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 6,000	Rp. 4,000	Rp. 8,000	Rp. 2,000	
	c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 8,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 3,000	
	d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 4,000	
	e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000	
	f.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000	
6.	TIMBANGAN CEPAT						
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 3,000	Rp. 6,000	Rp. 1,500	
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 6,000	Rp. 4,000	Rp. 8,000	Rp. 2,000	
	c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 8,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 3,000	
	d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 4,000	
	e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000	
	f.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000	
7.	TIMBANGAN						

	c.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000
	d.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000
8.	NERACA					
	a.	Neraca Biasa	Rp. 7,500	Rp. 5,000	Rp. 8,000	
	b.	Neraca Emas	Rp. 10,000	Rp. 7,500	Rp. 11,000	
	c.	Neraca Obat	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 16,000	
6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK					
1.	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (biasa dan sedang)					
	a.	sampai dengan 1 kilogram	Rp. 7,500	Rp. 4,000	Rp. 10,000	Rp. 2,000
	b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 6,000	Rp. 12,500	Rp. 3,000
	c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 12,500	Rp. 8,000	Rp. 15,000	Rp. 4,000
	d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 17,500	Rp. 5,000
	e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 17,500	Rp. 12,000	Rp. 20,000	Rp. 6,000
	f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 7,500
	g.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 25,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000	Rp. 10,000
2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)					
	a.	sampai dengan 1 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 6,000	Rp. 12,500	Rp. 3,000
	b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 12,500	Rp. 8,000	Rp. 15,000	Rp. 4,000
	c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 17,500	Rp. 5,000
	d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 17,500	Rp. 12,000	Rp. 20,000	Rp. 6,000
	e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000	Rp. 7,500
	f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 25,000	Rp. 20,000	Rp. 35,000	Rp. 10,000
	g.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 30,000	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 12,500
3.	Timbangan Elektronik Kelas I (khusus)					
	a.	sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 10,000
7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK					

2.	Timbangan Jembatan 2 (Dua) Indikator					
		Kapasitas dalam ton, setiap ton	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 4,500	Rp. 500
		dengan minimal Rp. 75,000,-				
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN					
	a.	sampai dengan ton/jam	Rp. 150,000	Rp. 125,000	Rp. 150,000	Rp. 50,000
	b.	Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 250,000	Rp. 100,000
	c.	Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 350,000	Rp. 300,000	Rp. 350,000	Rp. 150,000
9.	METER TAKSI					
		Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 5,000
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	1.	Meter Kerja				
	a.	sampai dengan 15 m3/h	Rp. 30,000	Rp. 30,000	Rp. 30,000	Rp. 15,000
	b.	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 20,000
	c.	Lebih dari 100 m3/h	Rp. 60,000	Rp. 60,000	Rp. 60,000	Rp. 30,000
	2.	Meter Induk (Master Meter)				
	a.	sampai dengan 15 m3/h	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 25,000
	b.	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 70,000	Rp. 70,000	Rp. 70,000	Rp. 30,000
	c.	Lebih dari 100 m3/h	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 50,000
	3.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak				
	a.	Untuk setiap badan ukur	Rp. 25,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 7,500
	4.	Meter Gas				
	a.	sampai dengan 50 m3/h	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 5,000
	b.	Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb:	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 20,000
		1.) 50 m3/h pertama	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 5,000
		2.) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h				
		setiap 10 m3/h	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,500	Rp. 200
		3.) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1,000 m3/h				
		setiap 10 m3/h	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 750	Rp. 150
		4.) Selebihnya dari 1,000 m3/h sampai dengan 2,000 m3/h				

5.	Meter Air					
	a.	Kapasitas 10 m3/h dan kurang	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 250
	b.	Kapasitas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 2,000
	c.	Kapasitas 100 m3/h Lebih	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 5,000
6.	Meter Listrik					
	a.	1 phasa kelas 2	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 400
	b.	3 phasa kelas 2	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 1,200
	c.	1 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 600
	d.	3 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 2,000
		Meter Pembatas Arus	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 500
11.	ALAT UKUR VOLUMETRIK					
	1.	Meter Prover				
	a.	Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
	b.	Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10,000 liter/seksi	Rp. 200,000	Rp. 200,000	Rp. 200,000	
	c.	Kapasitas lebih dari 10,000 liter/seksi	Rp. 300,000	Rp. 300,000	Rp. 300,000	
	2.	Alat Ukur dari Gelas				
	a.	Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 10,000	
	b.	Gelas ukur setiap 10 mililiter dikalikan dengan	Rp. 100	Rp. 100	Rp. 100	
	3.	Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung				
	A.	Bentuk Silinder Tegak				
	1.	sampai dengan 500 kL	Rp. 150,000	Rp. 150,000	Rp. 150,000	
	2.	Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a.	500 kL pertama	Rp. 150,000	Rp. 150,000	Rp. 150,000	
	b.	Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 2,000	Rp. 2,000	Rp. 2,000	
	c.	Selebihnya dari 1,000 kL sampai dengan 2,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	
	d.	Selebihnya dari 2,000 kL sampai dengan 5,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 750	
	e.	Selebihnya dari 5,000 kL sampai dengan 20,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 250	Rp. 250	Rp. 250	
	f.	Selebihnya dari 20,000 kL, setiap 10 kL	Rp. 150	Rp. 150	Rp. 150	
		Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL				

	2.	Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
		a. 500 kL pertama	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
		b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 3,500	Rp. 3,500	Rp. 3,500	
		c. Selebihnya dari 1,000 kL, setiap 10 kL	Rp. 2,500	Rp. 2,500	Rp. 2,500	
		Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL				
	C.	Bentuk Silinder Datar				
	1.	sampai dengan 10 kL	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
	2.	Lebih dari 10 kL dihitung sbb:				
		a. 10 kL pertama	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
		b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL				
		setiap 1 kL	Rp. 2,500	Rp. 2,500	Rp. 2,500	
		c. Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	
	4.	Tangki Ukur Gerak				
	A.	Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
	1.	sampai dengan 5 kL	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 10,000
	2.	Lebih dari 5 kL dihitung sbb:				
		a. 5 kL pertama	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 10,000
		b. Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000
		Bagian dari kL dihitung 1 kL				
	B.	Tangki Ukur Tongkang dan Apung				
	1.	sampai dengan 50 kL	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
	2.	Lebih dari 50 kL dihitung sbb:				
		a. 50 kL pertama	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
		b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL				
		setiap 1 kL	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	
		c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL				
		setiap 1 kL	Rp. 1,200	Rp. 1,200	Rp. 1,200	
		d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL				
		setiap 1 kL	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	
		e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL				
		setiap 1 kL	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 750	
		f. Selebihnya dari 500 kL, setiap 1 kL				

12.	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA				
	a.	Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer/Recorder)	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000
	b.	Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000
	c.	Meter Kadar Air	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000
	d.	Alat Ukur Textile Kabel dan sejenisnya	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000
	e.	Alat Ukur Tinggi	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	f.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 15,000	Rp. 15,000	Rp. 15,000
	g.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000
	h.	Stop Watch (Pengukur Waktu)	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	i.	Speedometer (Pengukur Kecepatan)	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	j.	Meter Parkir	Rp. 2,000	Rp. 2,000	Rp. 2,000
	k.	Naraca Analitis	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000
	l.	Naraca Substitusi	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000
	m.	Thermometer	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	n.	Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp. 10,000 Rp. 1000	Rp. 10,000 Rp. 1000	Rp. 10,000 Rp. 1000
	o.	Mesin/Alat Ukur Luas	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	p.	Alat Ukur Sudut	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	r.	Blok Gauge (Blok Ukur)	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000
	s.	Micrometer	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000
	t.	Aerometer dan Densimeter	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000
	u.	Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000
	v.	Perlengkapan Meter Gas Orofis	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000
	u.	Alat-alat ukur presisi lainnya	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000

